



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 19 / PID / 2012 / PT.MAL**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA</b>
	:	Tual
Tempat tanggal Lahir	:	48 tahun / 23 Juni 1962
U m u r	:	Laki - laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Tual, Pokarina Ohobun Barat
Tempat tinggal	:	Langgur
	:	Malra
A g a m a	:	Kristen Protestan
P e k e r j a a n	:	Mantan Anggota DPRD Kab. Malra
	:	Periode Tahun 1999 – 2004
Pendidikan	:	S.1 (Berijazah)

-----Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum

- 1 KAREL RIRY, SH, MTH Apt ;
- 2 MOHAMMAD DIN TOATUBUN, SH ;

Beralamat pada Kantor Ecclesia Law Firm; Jln. Mr. Chr. Soplanit RT 04/RW 12 Rumah tiga –Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/ELF/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 196/2011 tanggal 23 Mei 2011 ;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Ambon berdasarkan Perintah/

Penetapan sebagai berikut :



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik, Nomor : PRINT-12/S.1/Fd.1/04/2011 tertanggal 08 April 2011, sejak 08 April 2011 s/d 27 April 2011 ;
  - 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor 11/S1.1/Fd.1/04/2011 tertanggal 21 April 2011, sejak 28 April 2011 s/d 06 Juni 2011 ;
  - 3 Jaksa Penuntut Umum, Nomor : PRIN-050/S1.10/Ft.1/05/2011 tertanggal Mei 2011, sejak 23 Mei 2011 s/d 11 Juni 2011 ;
  - 4 Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor :259/Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 30 Mei 2011, sejak 24 Mei 2011 s/d 22 Juni 2011 ;
  - 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor :259/Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 20 Juni 2011 tertanggal 23 Juni 2011 s/d 21 Agustus 2011 ;
  - 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I Nomor : 126/Pen.Pid/2011/PT.MAL, tertanggal 12 Agustus 2011, sejak 22 Agustus 2011 s/d 20 September 2011 ;
  - 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II Nomor : 126/Pen.Pid/2011/PT.MAL, tertanggal 16 September 2011, sejak 21 September 2011 s/d 29 Oktober 2011 ;
- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2012, Nomor : Nomor : 255/ PID.B/2011/PN.AB, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2011 No. Reg. Perkara : PDS-06 /AMBON/05/ 2011. terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 – 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :171- 2378 tahun 1999 tanggal 04 Oktober tentang persmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan:

1. ADAM RAHAYAA.N.S.Ag
2. Drs.H.MAHMUD TAMHER
3. STEVEN TAPOTUBUN,S.Ip (Almarhum)
4. Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
5. MOZES SAVSANUBUN
6. Drs. MUSA BUCE KWAIKOTA



7. Nn. JULIANA MARSELORITA KOMNARIS, SH

8. Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN

9. HIRONIMUS TENIWUT

10. Drs. H.ABDUL MUTALIB H.NOTANUBUN

11. WILHELMUS BARENDS

12. VICTOR SAVSAVUBUN

13. MUCHSIN AWAD AZIS

14. HARRY SARKOL

15. YOSEP ULI RAHAIL

16. NOHO RENUAT (Almarhum)

17. HIRONIMUS RENYUT

18. TONY KAREL RETRAUBUN,SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang peresmian Pengangkatan Susunan keanggotaan antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

19.(1) SAMAILA ABDUL RAHMAN

20.(2) NELSON KADMER

21.(3) VICTOR JACOBUS WARAT

22.(4) HERMAN REFRA

23.(5) PETRUS RENJAAN,S.Sos

24.(6) RULAN JUFRI BETAUBUN

25.(7) JOHANIS WEE

26.(8) OSCAR THONTJI OHOIWUTUN

27.(9) GAINAU de GAMES.SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

28. (1) SAFARUDIN VAKAUBUN,SE

29. (2) IVO J.RATUANAK,BA

30. (3) Drs.MUSA BUCE KWAITOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari Fraksi TNI/Polri yakni:

31.(1) WF PATTIANAKOTTA

32.(2) ALBINUS HURULEAN

33.(3) H. ORAPLEAN

34.(4) M.R RAHANGMETAN



Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 November 2003, 29 November 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHPA serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 066/KMA/SK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus Perkara Pidana Atas nama terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 III dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar **Rp.1.410.000.000,-** (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp.4.375.000.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tahun anggaran anggaran 2002 Terdakwa Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan anggota Anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-386 tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.**
- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA bersama 34 anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima dana Asuransi sejumlah Rp.135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut :



- 1 Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003
- 2 Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:904/2003 tanggal 30 September 2003.
- 3 Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
- 4 Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003
- 5 Pada tanggal 29 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)sebagaimana kwitansi nomor:2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003.
- 6 Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta)sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.

- Bahwa terdakwa Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 seharusnya menggunakan dana Asuransi yang mereka terima didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

**1-- Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan Daerah Pasal 4, yang berbunyi:**

“Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib,taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,efisien,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”

Dan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

*“Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”*

Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor:154 Tahun 2002 tentang penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, pencairan dana asuransi seharusnya digunakan untuk membayar polis asuransi tetapi ternyata terdakwa tidak mempunyai polis asuransi dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

**2-- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002:**

Pasal 49 ayat (5), yang berbunyi :



*“Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”*

Yakni dana asuransi yang diterima oleh Terdakwa Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut seharusnya digunakan untuk membayar asuransi sehingga penggunaan dana itu didukung bukti-bukti yang sah yakni berupa Polis Asuransi, namun dana asuransi yang telah diterima dalam bentuk uang tunai oleh terdakwa Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANDA bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tidak dipergunakan untuk membayar asuransi pada perusahaan asuransi manapun melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANDA bersama anggota DPRD Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat seluruhnya sebesar Rp.5.785.000.000. (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa **Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 – 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :171- 2378 tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan:

1. ADAM RAHAYAAN.S.Ag
2. Drs.H.MAHMUD TAMHER
3. STEVEN TAPOTUBUN,S.Ip (Almarhum)
4. Drs. MUSA BUCE KWAITOTA
5. MOZES SAVSANUBUN
6. Drs. MUSA BUCE KWAIKOTA
7. Nn. JULIANA MARSELORITA KOMNARIS, SH



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
9. HIRONIMUS TENIWUT
10. Drs. H.ABDUL MUTALIB H.NOTANUBUN
11. WILHELMUS BARENDS
12. VICTOR SAVSAVUBUN
13. MUCHSIN AWAD AZIS
14. HARRY SARKOL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. YOSEP ULI RAHAIL

16. NOHO RENUAT (Almarhum)

17. HIRONIMUS RENYUT

18. TONY KAREL RETRAUBUN,SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang peresmian Pengangkatan Susunan keanggotaan antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

19.(1) SAMAILA ABDUL RAHMAN

20.(2) NELSON KADMER

21.(3) VICTOR JACOBUS WARAT

22.(4) HERMAN REFRA

23.(5) PETRUS RENJAAN,S.Sos

24.(6) RULAN JUFRI BETAUBUN

25.(7) JOHANIS WEE

26.(8) OSCAR THONTJI OHOIWUTUN

27.(9) GAINAU de GAMES.SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

28. (1) SAFARUDIN VAKAUBUN,SE

29. (2) IVO J.RATUANAK,BA

30. (3) Drs.MUSA BUCE KWAITOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari Fraksi TNI/Polri yakni:

31.(1) WF PATTIANAKOTTA

32.(2) ALBINUS HURULEAN

33.(3) H. ORAPLEAN

34.(4) M.R RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 November 2003, 29 November 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHPA serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 066/KMA/SK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus



Perkara Pidana Atas nama terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA, dkk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 III dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar **Rp.1.410.000.000,-** (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp.4.375.000.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 tersebut, terdakwa dan anggaran DPRD Kabupaten Maluku tenggara periode tahun 1999-2004 lainnya berhak menerima dana asuransi untuk pemeliharaan kesehatan.
- Bahwa dalam kedudukannya selaku anggaran DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terdakwa mempunyai kesempatan mendapatkan fasilitas dari daerah Kabupaten Maluku Tenggara berupa dana asuransi sebagaimana mata anggaran 2.2.1.1011.90.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengetahui penggunaan dana asuransi tersebut untuk menjamin kesehatannya sebagai anggota dewan sebagaimana diatur dengan APBD namun kenyataannya dana asuransi tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai dana asuransi akan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang lain.
- Untuk dapat mencairkan dana asuransi tersebut harus mengikuti prosedur atau syarat-syarat pendaftaran polis, namun ternyata terdakwa tidak pernah memiliki polis asuransi dan tidak menjadi tertanggung oleh salah satu perusahaan asuransi.



•-- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Terdakwa Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-386 tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor:168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.**

•-- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA bersama 34 anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

•-- Bahwa Terdakwa menerima dana Asuransi sejumlah Rp.135.000.000 tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003
- 2 Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:904/2003 tanggal 30 September 2003.
- 3 Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
- 4 Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003
- 5 Pada tanggal 29 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003.
- 6 Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta) sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.

• Bahwa dengan perbuatan menyalahgunakan kesempatan sebagaimana diuraikan di atas terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

• Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara seluruhnya sebesar Rp.5.785.000.000. (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)



----- Perbuatan terdakwa **Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk: PDS-06/Ambon/05/2011 tertanggal 13 Oktober 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan terhadap terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 4 Menghukum **Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 5 Menetapkan agar barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas dipergunakan untuk perkara lain.
- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan Terdakwa **Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama Secara Berlanjut”** ;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) TAHUN** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) BULAN** ;

- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

- 4 Menghukum terdakwa **Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) BULAN** ;

- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,
- 2 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,
- 3 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 5 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 6 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 7 Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 8 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
- 9 Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 10 Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 11 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 12 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
- 13 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 14 Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 15 Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 16 Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 17 Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 18 Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 19 Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3. 325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 20 DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,
- 21 Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher,
- 22 Polis Asuransi Nomor : 2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut,
- 23 Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat,
- 24 Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

25 Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST Tapotubun  
S.Ip.,

26 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus Ronny  
Renyut,

27 Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama  
Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph U. Rahail,

28 Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama  
Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus Rejaan, S.Sos.,

29 Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J Ratuanak,

30 Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin Awad  
Aziz,

31 Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama  
Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam Rahayaan, S.Ag.,

32 Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin  
Fakaubun, SE.,

33 Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L.  
Rahanubun,

34 Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry Sarkol,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

35 Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Musa Buce  
Kwaitota,

36 Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Engelbertus  
Janwarin,

37 Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Albinus  
Hurulean,

38 Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de  
Games,SH.,

39 Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rula Jufri  
Betaubun,

40 Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M.  
Komnaris,SH.,

41 Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci  
Tapotubun,

42 Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W. Rahanra,

43 Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel  
Retraubun,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad Rum  
Rahangmetan,

45 Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses  
Savsavubun,

46 Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M.  
Oraplean,

47 Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman Refra,

48 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson Kadmaer,

49 Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Johanis  
Savsavubun,

50 Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H.  
Notanubun,

51 Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat,

52 Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi  
Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul  
Rahman,

53 Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama  
Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus

Barends,

55 Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama

Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam perkara lain ;

6 Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Maret 2012 Nomor : 08/Akta Pid.B/2012/PN.AB, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya pada tanggal 03 April 2012.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W27-U1/308/HK.07/III/2012, terhitung mulai tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 255/Pid.B/2011/PN.AB, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih



dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan perubahan tentang :

- 1 Lamanya pidana yang dijatuhkan, yang menurut Pengadilan Tinggi, oleh Hakim Tingkat Pertama, yaitu 1 (satu) tahun adalah terlalu ringan, dan adil jika hukuman yang dijatuhkan ditambah menjadi 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD, seharusnya tidak melakukan Korupsi, dan harus menjadi panutan masyarakat atau rakyat dimana ia wakili.
- Bahwa sebagai anggota DPRD seharusnya bersama-sama Pemerintah, mencegah atau memberantas Korupsi sebab pencegahan dan pemberantasan Korupsi merupakan program Pemerintah yang terpadu.



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, merubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 255/Pid.B/2011/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 197 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;  
-----
- **Merubah** Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 255/Pid.B/2011/PN.AB, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut ;  
-----

• **Menjatuhkan pidana** kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 255/PID.B/2011/PN.AB, tersebut untuk selebihnya ;  
-----
- **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Juli 2012**. Oleh **SUDRAJAD DIMYATI, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDUARD MANALIP, SH** dan **SOFYAN SYAH, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal **14 Mei 2012**, Nomor : **19/PID/2012/PT.MAL**,



untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SOFIA MAITIMU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**EDUARD MANALIP, SH**

**SUDRAJAD DIMYATI, SH.MH**

**SOFYAN SYAH, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI

**SOFIA MAITIMU**

**Untuk Turunan  
Pengadilan Tinggi Maluku ;  
Plh. Panitera**

**= SOFIA MAITIMU . =  
NIP. 19610912 198303 2 003.-**